



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 126/PMK. 07/2008

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER
DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2003
SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2007

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa kurang bayar dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 229/KMK.06/2003 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2003;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.02/2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2006;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.07/2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 517 K/81/MEM/2003 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum untuk Tahun 2003;
 2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2094 K/80/MEM/2005 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum untuk Tahun 2006;
 3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2794 K/80/MEM/2006 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum untuk Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2003 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

- (1) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum merupakan penerimaan negara bukan pajak Sumber Daya Alam pertambangan umum yang belum dibagikan kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum

Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2007 berasal dari penerimaan negara bukan pajak Sumber Daya Alam Pertambangan Umum pada Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2007.

- (3) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp697.435.344.988,- (enam ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Royalti sebesar Rp675.764.104.350,- (enam ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah); dan
 - b. Iuran Tetap (*Landrent*) Rp21.671.240.638,- (dua puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 2

- (1) Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2007 berasal dari Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008.
- (2) Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2007 untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

- (1) Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota dilaksanakan sekaligus dalam Tahun Anggaran 2008.
- (2) Tata cara penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2008
MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 126 /PMK.07/2006 TENTANG PENETAPAN ALOKASI
KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2003 S.D. 2007

PENETAPAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2003 S.D. 2007

(dalam rupiah)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Juran Tetap	Royalty	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	735.943.447,00	-	735.943.447,00
1	Kab. Aceh Barat	4.243.743,00	-	4.243.743,00
2	Kab. Aceh Besar	3.518.592,00	-	3.518.592,00
3	Kab. Aceh Selatan	-	-	-
4	Kab. Aceh Singkil	-	-	-
5	Kab. Aceh Tengah	522.208.960,00	-	522.208.960,00
6	Kab. Aceh Tenggara	-	-	-
7	Kab. Aceh Timur	-	-	-
8	Kab. Aceh Utara	50.832.000,00	-	50.832.000,00
9	Kab. Bireun	-	-	-
10	Kab. Aceh Pidie	2.377.063,00	-	2.377.063,00
11	Kab. Simeulue	-	-	-
12	Kota Banda Aceh	-	-	-
13	Kota Sabang	-	-	-
14	Kota Langsa	-	-	-
15	Kota Lhokseumawe	-	-	-
16	Kab. Nagan Raya	6.374.400,00	-	6.374.400,00
17	Kab. Aceh Jaya	-	-	-
18	Kab. Aceh Barak Daye	-	-	-
19	Kab. Gayo Lues	-	-	-
20	Kab. Aceh Tamiang	-	-	-
21	Kab. Bener Merah	-	-	-
22	Kab. Pidie Jaya	-	-	-
23	Kota Subulussalam	-	-	-
	Prov. Nanggroe Aceh Darussalam	147.388.689,00	-	147.388.689,00
	SUMATERA UTARA	31.838.400,00	-	31.838.400,00
1	Kab. Asahan	-	-	-
2	Kab. Deli	-	-	-
3	Kab. Deli Serdang	-	-	-
4	Kab. Tanah Karo	-	-	-
5	Kab. Labuhan Batu	-	-	-
6	Kab. Langkat	-	-	-
7	Kab. Mandailing Natal	25.470.720,00	-	25.470.720,00
8	Kab. Nias	-	-	-
9	Kab. Simalungun	-	-	-
10	Kab. Tapanuli Selatan	-	-	-
11	Kab. Tapanuli Tengah	-	-	-
12	Kab. Tapanuli Utara	-	-	-
13	Kab. Toba Samosir	-	-	-
14	Kota Binjai	-	-	-
15	Kota Medan	-	-	-
16	Kota Pematang Siantar	-	-	-
17	Kota Sibolga	-	-	-
18	Kota Tanjung Balai	-	-	-
19	Kota Tebing Tinggi	-	-	-
20	Kota Padang Sidempuan	-	-	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(dalam rupiah)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Iuran Tetap	Royalty	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
21	Kab. Pakpak Bharat	-	-	-
22	Kab. Nias Selatan	-	-	-
23	Kab. Humbang Hasundutan	-	-	-
24	Kab. Serdang Bedagai	-	-	-
25	Kab. Samosir	-	-	-
26	Kab. Batu Bara	-	-	-
	Prov. Sumatera Utara	6.367.680,00	-	6.367.680,00
	SUMATERA BARAT	1.060.816.052,00	566.139.066,00	1.616.954.118,00
1	Kab. Limapuluh Kota	13.121.216,00	49.701.655,00	62.823.071,00
2	Kab. Agam	-	12.580.868,00	12.580.868,00
3	Kab. Kepulauan Mentawai	-	12.580.868,00	12.580.868,00
4	Kab. Padang Pariaman	-	12.580.868,00	12.580.868,00
5	Kab. Pasaman	14.000.048,00	12.580.868,00	26.580.916,00
6	Kab. Pesisir Selatan	-	12.580.868,00	12.580.868,00
7	Kab. Sawahlunto Sijunjung	-	12.580.868,00	12.580.868,00
8	Kab. Solok	-	12.580.868,00	12.580.868,00
9	Kab. Tanah Datar	-	12.580.868,00	12.580.868,00
10	Kota Bukik Tinggi	-	12.580.868,00	12.580.868,00
11	Kota Padang Panjang	-	12.580.868,00	12.580.868,00
12	Kota Padang	-	12.580.868,00	12.580.868,00
13	Kota Payakumbuh	-	12.580.868,00	12.580.868,00
14	Kota Sawahlunto	1.728.000,00	188.614.641,00	188.342.641,00
15	Kota Solok	-	12.580.868,00	12.580.868,00
16	Kota Pariaman	-	12.580.868,00	12.580.868,00
17	Kab. Pasaman Barat	-	12.580.868,00	12.580.868,00
18	Kab. Dharmasraya	611.802.778,00	16.300.868,00	627.103.646,00
19	Kab. Solok Selatan	-	12.580.868,00	12.580.868,00
	Prov. Sumatera Barat	210.163.010,00	113.227.614,00	323.390.624,00
	RIAU	120.367.600,00	3.661.206.161,00	4.001.592.761,00
1	Kab. Bengkalis	-	155.248.207,00	155.248.207,00
2	Kab. Indragiri Hilir	-	155.248.207,00	155.248.207,00
3	Kab. Indragiri Hulu	18.000.000,00	1.538.219.162,00	1.554.219.162,00
4	Kab. Kampar	67.495.680,00	156.760.207,00	224.255.887,00
5	Kab. Kuantan Singingi	12.814.400,00	156.248.207,00	168.062.607,00
6	Kab. Pelalawan	-	155.248.207,00	155.248.207,00
7	Kab. Rokan Hilir	-	155.248.207,00	155.248.207,00
8	Kab. Rokan Hulu	-	155.248.207,00	155.248.207,00
9	Kab. Siak	-	167.999.119,00	167.999.119,00
10	Kota Dumai	-	155.248.207,00	155.248.207,00
11	Kota Pekanbaru	-	155.248.207,00	155.248.207,00
	Prov. Riau	24.077.520,00	776.241.037,00	800.318.557,00
	KEPULAUAN RIAU	1.145.079.060,00	23.617.747.499,00	24.662.826.559,00
1	Kab. Bintan	-	3.852.156.066,00	3.852.156.066,00
2	Kab. Natuna	-	2.083.528.679,00	2.083.528.679,00
3	Kab. Karimun	436.438.560,00	4.277.224.477,00	4.713.663.037,00
4	Kota Batam	-	2.083.528.679,00	2.083.528.679,00
5	Kota Tanjung Pinang	3.523.200,00	3.588.960.619,00	3.592.503.719,00
6	Kab. Lingga	102.730.608,00	2.151.437.734,00	2.254.168.342,00
	Prov. Kepulauan Riau	602.366.668,00	5.460.691.345,00	6.063.058.013,00
	JAMBI	209.225.200,00	1.767.161.660,00	1.976.386.860,00
1	Kab. Batanghari	22.054.400,00	105.745.295,00	127.799.695,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(dalam rupiah)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Iuran Tetap	Royalti	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
2	Kab. Bungo	105.042.720,00	679.655.400,00	785.598.120,00
3	Kab. Kenaci	-	78.540.069,00	78.540.069,00
4	Kab. Merangin	-	78.540.069,00	78.540.069,00
5	Kab. Muaro Jambi	-	78.540.069,00	78.540.069,00
6	Kab. Sarolangun	32.652.800,00	78.540.089,00	111.192.889,00
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	6.730.240,00	78.540.069,00	85.270.309,00
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	78.540.069,00	78.540.069,00
9	Kab. Tebo	-	78.540.069,00	78.540.069,00
10	Kota Jambi	-	78.540.069,00	78.540.069,00
	Prov. Jambi	41.843.040,00	353.430.313,00	395.275.353,00
	SUMATERA SELATAN	750.639.289,00	-	750.639.289,00
1	Kab. Lahat	72.114.508,00	-	72.114.508,00
2	Kab. Musi Banyuasin	124.642.659,00	-	124.642.659,00
3	Kab. Musi Rawas	132.487.680,00	-	132.487.680,00
4	Kab. Muara Enim	104.496.281,00	-	104.496.281,00
5	Kab. Ogan Komering Ilir	-	-	-
6	Kab. Ogan Komering Ulu	28.905.516,00	-	28.905.516,00
7	Kota Palembang	-	-	-
8	Kota Pagar Alam	-	-	-
9	Kota Lubuk Linggau	-	-	-
10	Kota Prabumulih	-	-	-
11	Kab. Banyuasin	104.764.752,00	-	104.764.752,00
12	Kab. Ogan Ilir	3.145.600,00	-	3.145.600,00
13	Kab. OKU Timur	17.154.433,00	-	17.154.433,00
14	Kab. OKU Selatan	12.800.000,00	-	12.800.000,00
15	Kab. Empat Lawang	-	-	-
	Prov. Sumatera Selatan	150.127.856,00	-	150.127.856,00
	BANGKA BELITUNG	9.487.480.880,00	176.000.227.272,00	184.487.718.152,00
1	Kab. Bangka	1.734.074.560,00	30.336.761.543,00	32.070.836.103,00
2	Kab. Belitung	368.857.920,00	17.950.209.200,00	18.319.067.120,00
3	Kota Pangkal Pinang	67.523.040,00	11.868.661.816,00	11.734.204.856,00
4	Kab. Bangka Selatan	1.544.377.664,00	17.507.831.183,00	19.052.208.847,00
5	Kab. Bangka Tengah	885.505.280,00	19.005.642.724,00	19.891.148.004,00
6	Kab. Bangka Barat	1.958.674.560,00	26.088.868.465,00	28.055.543.025,00
7	Kab. Belitung Timur	1.032.979.680,00	17.434.186.884,00	18.487.166.564,00
	Prov. Bangka Belitung	1.897.496.176,00	35.000.045.455,00	36.897.543.631,00
	BENGKULU	31.286.000,00	2.221.984.849,00	2.253.270.849,00
1	Kab. Bengkulu Selatan	-	111.099.247,00	111.099.247,00
2	Kab. Bengkulu Utara	9.401.600,00	766.333.773,00	777.735.373,00
3	Kab. Rejang Lebong	-	111.099.247,00	111.099.247,00
4	Kota Bengkulu	-	111.099.247,00	111.099.247,00
5	Kab. Kaur	-	111.099.247,00	111.099.247,00
6	Kab. Seluma	15.627.200,00	231.559.456,00	247.186.656,00
7	Kab. Mukomuko	-	111.099.247,00	111.099.247,00
8	Kab. Lebong	-	111.099.247,00	111.099.247,00
9	Kab. Kepahiang	-	111.099.247,00	111.099.247,00
	Prov. Bengkulu	6.257.200,00	444.396.991,00	450.654.191,00
	LAMPUNG	37.111.952,00	-	37.111.952,00
1	Kab. Lampung Barat	-	-	-
2	Kab. Lampung Selatan	7.744.000,00	-	7.744.000,00
3	Kab. Lampung Tengah	-	-	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(dalam rupiah)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Iuran Tetap	Royalti	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
4	Kab. Lampung Utara	-	-	-
5	Kab. Lampung Timur	-	-	-
6	Kab. Tanggamus	21.292.889,00	-	21.292.889,00
7	Kab. Tulang Bawang	-	-	-
8	Kab. Way Kanan	652.673,00	-	652.673,00
9	Kota Bandar Lampung	-	-	-
10	Kota Metro	-	-	-
	Prov. Lampung	7.422.390,00	-	7.422.390,00
	DKI JAKARTA	-	-	-
	JAWA BARAT	24.060.247,00	69.123.493,00	93.203.740,00
1	Kab. Bandung	-	985.391,00	985.391,00
2	Kab. Bekasi	-	985.391,00	985.391,00
3	Kab. Bogor	7.160.518,00	22.034.806,00	29.195.324,00
4	Kab. Ciamis	-	985.391,00	985.391,00
5	Kab. Cianjur	-	985.391,00	985.391,00
6	Kab. Cirebon	-	985.391,00	985.391,00
7	Kab. Garut	-	985.391,00	985.391,00
8	Kab. Indramayu	-	985.391,00	985.391,00
9	Kab. Karawang	-	985.391,00	985.391,00
10	Kab. Kuningan	-	985.391,00	985.391,00
11	Kab. Majalengka	-	985.391,00	985.391,00
12	Kab. Purwakarta	-	985.391,00	985.391,00
13	Kab. Subang	-	985.391,00	985.391,00
14	Kab. Sukabumi	12.103.680,00	2.599.991,00	14.703.671,00
15	Kab. Sumedang	-	985.391,00	985.391,00
16	Kab. Tasikmalaya	-	985.391,00	985.391,00
17	Kota Bandung	-	985.391,00	985.391,00
18	Kota Bekasi	-	985.391,00	985.391,00
19	Kota Bogor	-	985.391,00	985.391,00
20	Kota Cirebon	-	985.391,00	985.391,00
21	Kota Depok	-	985.391,00	985.391,00
22	Kota Sukabumi	-	985.391,00	985.391,00
23	Kota Cimahi	-	985.391,00	985.391,00
24	Kota Tasikmalaya	-	985.391,00	985.391,00
25	Kota Banjar	-	985.391,00	985.391,00
26	Kab. Bandung Barat	-	-	-
	Prov. Jawa Barat	4.816.049,00	11.824.703,00	16.640.752,00
	BANTEN	2.137.800,00	955.454.125,00	957.591.725,00
1	Kab. Lebak	1.710.080,00	342.181.650,00	343.891.730,00
2	Kab. Pandeglang	-	68.436.330,00	68.436.330,00
3	Kab. Serang	-	68.436.330,00	68.436.330,00
4	Kab. Tangerang	-	68.436.330,00	68.436.330,00
5	Kota Cilegon	-	68.436.330,00	68.436.330,00
6	Kota Tangerang	-	68.436.330,00	68.436.330,00
	Prov. Banten	427.520,00	171.090.825,00	171.518.345,00
	JAWA TENGAH	1.756.000,00	505.848.812,00	507.604.812,00
1	Kab. Banjarnegara	-	5.951.162,00	5.951.162,00
2	Kab. Banyumas	-	5.951.162,00	5.951.162,00
3	Kab. Batang	-	5.951.162,00	5.951.162,00
4	Kab. Biora	-	5.951.162,00	5.951.162,00
5	Kab. Boyolali	-	5.951.162,00	5.951.162,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(dalam rupiah)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Iuran Tetap	Royalty	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
6	Kab. Brebes	-	5.951.162,00	5.951.162,00
7	Kab. Cilacap	1.404.800,00	5.951.162,00	7.355.962,00
8	Kab. Demak	-	5.951.162,00	5.951.162,00
9	Kab. Grobogan	-	5.951.162,00	5.951.162,00
10	Kab. Jepara	-	5.951.162,00	5.951.162,00
11	Kab. Karanganyar	-	5.951.162,00	5.951.162,00
12	Kab. Kebumen	-	5.951.162,00	5.951.162,00
13	Kab. Kendal	-	5.951.162,00	5.951.162,00
14	Kab. Klaten	-	5.951.162,00	5.951.162,00
15	Kab. Kudus	-	5.951.162,00	5.951.162,00
16	Kab. Magelang	-	5.951.162,00	5.951.162,00
17	Kab. Pati	-	5.951.162,00	5.951.162,00
18	Kab. Pekalongan	-	5.951.162,00	5.951.162,00
19	Kab. Pemasang	-	5.951.162,00	5.951.162,00
20	Kab. Purbelingga	-	5.951.162,00	5.951.162,00
21	Kab. Purworejo	-	202.339.536,00	202.339.536,00
22	Kab. Rembang	-	5.951.162,00	5.951.162,00
23	Kab. Semarang	-	5.951.162,00	5.951.162,00
24	Kab. Sragen	-	5.951.162,00	5.951.162,00
25	Kab. Sukoharjo	-	5.951.162,00	5.951.162,00
26	Kab. Tegal	-	5.951.162,00	5.951.162,00
27	Kab. Temanggung	-	5.951.162,00	5.951.162,00
28	Kab. Wonogiri	-	5.951.162,00	5.951.162,00
29	Kab. Wonosobo	-	5.951.162,00	5.951.162,00
30	Kota Magelang	-	5.951.162,00	5.951.162,00
31	Kota Pekalongan	-	5.951.162,00	5.951.162,00
32	Kota Salatiga	-	5.951.162,00	5.951.162,00
33	Kota Semarang	-	5.951.162,00	5.951.162,00
34	Kota Surakarta	-	5.951.162,00	5.951.162,00
35	Kota Tegal	-	5.951.162,00	5.951.162,00
	Prov. Jawa Tengah	351.200,00	101.169.768,00	101.520.968,00
	D.I. YOGYAKARTA	5.510.788,00	-	5.510.788,00
1	Kab. Bantul	-	-	-
2	Kab. Gunung Kidul	-	-	-
3	Kab. Kulon Progo	4.408.631,00	-	4.408.631,00
4	Kab. Sleman	-	-	-
5	Kota Yogyakarta	-	-	-
	Prov. D.I. Yogyakarta	1.102.157,00	-	1.102.157,00
	JAWA TIMUR	167.886.670,00	163.423.082,00	321.118.752,00
1	Kab. Bangkalan	-	1.766.736,00	1.766.736,00
2	Kab. Banyuwangi	-	7.215.384,00	7.215.384,00
3	Kab. Blitar	-	1.766.736,00	1.766.736,00
4	Kab. Bojonegara	-	1.766.736,00	1.766.736,00
5	Kab. Bondowoso	-	1.766.736,00	1.766.736,00
6	Kab. Gresik	-	1.766.736,00	1.766.736,00
7	Kab. Jember	-	1.766.736,00	1.766.736,00
8	Kab. Jombang	124.591.798,00	1.766.736,00	126.358.534,00
9	Kab. Kediri	-	1.766.736,00	1.766.736,00
10	Kab. Lamongan	-	1.766.736,00	1.766.736,00
11	Kab. Lumajang	-	24.463.927,00	24.463.927,00
12	Kab. Madiun	-	1.766.736,00	1.766.736,00
13	Kab. Magetan	-	1.766.736,00	1.766.736,00
14	Kab. Malang	-	1.766.736,00	1.766.736,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(dalam rupiah)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Iuran Tetap	Royalty	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
15	Kab. Mojokerto	1.664.738,00	32.572.831,00	34.137.569,00
16	Kab. Nganjuk	-	1.766.736,00	1.766.736,00
17	Kab. Ngawi	-	1.766.736,00	1.766.736,00
18	Kab. Pacitan	-	6.417.299,00	6.417.299,00
19	Kab. Pamekasan	-	1.766.736,00	1.766.736,00
20	Kab. Pasuruan	-	1.766.736,00	1.766.736,00
21	Kab. Ponorogo	-	1.766.736,00	1.766.736,00
22	Kab. Probolinggo	-	1.766.736,00	1.766.736,00
23	Kab. Sampang	-	1.766.736,00	1.766.736,00
24	Kab. Sidoarjo	-	1.766.736,00	1.766.736,00
25	Kab. Situbondo	-	1.766.736,00	1.766.736,00
26	Kab. Sumenep	-	1.766.736,00	1.766.736,00
27	Kab. Trenggalek	-	1.766.736,00	1.766.736,00
28	Kab. Tuban	-	1.766.736,00	1.766.736,00
29	Kab. Tulungagung	-	1.766.736,00	1.766.736,00
30	Kota Blitar	-	1.766.736,00	1.766.736,00
31	Kota Kediri	-	1.766.736,00	1.766.736,00
32	Kota Madiun	-	1.766.736,00	1.766.736,00
33	Kota Malang	-	1.766.736,00	1.766.736,00
34	Kota Mojokerto	-	1.766.736,00	1.766.736,00
35	Kota Pasuruan	-	1.766.736,00	1.766.736,00
36	Kota Probolinggo	-	1.766.736,00	1.766.736,00
37	Kota Surabaya	-	1.766.736,00	1.766.736,00
38	Kota Batu	-	1.766.736,00	1.766.736,00
	Prov. Jawa Timur	31.539.134,00	32.684.617,00	64.223.751,00
	KALIMANTAN BARAT	262.247.323,00	178.981.184,00	451.228.487,00
1	Kab. Bengkayang	11.453.568,00	6.508.406,00	17.961.974,00
2	Kab. Landak	1.236.032,00	6.508.406,00	7.744.438,00
3	Kab. Kapuas Hulu	117.248.000,00	6.508.406,00	123.756.406,00
4	Kab. Ketapang	25.220.480,00	64.591.361,00	89.811.841,00
5	Kab. Pontianak	-	6.508.406,00	6.508.406,00
6	Kab. Sambas	806.960,00	6.508.406,00	7.317.366,00
7	Kab. Sanggau	2.086.000,00	6.508.406,00	8.596.406,00
8	Kab. Sintang	-	6.508.406,00	6.508.406,00
9	Kota Pontianak	-	6.508.406,00	6.508.406,00
10	Kota Singkawang	-	6.508.406,00	6.508.406,00
11	Kab. Sekadau	61.342.819,00	13.508.510,00	74.852.329,00
12	Kab. Melawi	6.400.000,00	6.508.406,00	12.908.406,00
13	Kab. Kayong Utara	-	-	-
	Prov. Kalimantan Barat	56.449.464,00	35.788.233,00	92.245.697,00
	KALIMANTAN TENGAH	1.597.368.981,00	6.062.867.278,00	7.660.237.268,00
1	Kab. Bantoe Selatan	99.738.320,00	186.549.762,00	286.288.082,00
2	Kab. Bantoe Utara	58.343.786,00	284.215.023,00	343.558.809,00
3	Kab. Kepuas	98.485.567,00	186.549.762,00	285.035.329,00
4	Kab. Kotawaringin Barat	170.045.120,00	618.164.285,00	788.209.405,00
5	Kab. Kotawaringin Timur	45.139.840,00	620.421.235,00	665.561.075,00
6	Kota Palangkaraya	59.799.360,00	216.883.104,00	276.682.464,00
7	Kab. Bantoe Timur	155.018.136,00	405.676.828,00	560.694.964,00
8	Kab. Murung Raya	470.242.960,00	442.823.410,00	913.066.370,00
9	Kab. Pulang Pisau	-	186.549.762,00	186.549.762,00
10	Kab. Gunung Mas	110.847.104,00	201.506.630,00	312.153.734,00
11	Kab. Lamandau	-	186.549.762,00	186.549.762,00
12	Kab. Sukemara	-	186.549.762,00	186.549.762,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(dalam rupiah)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Iuran Tetap	Royalty	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
13	Kab. Katingan	9.436.800,00	724.953.651,00	734.390.451,00
14	Kab. Seruyan	-	202.998.845,00	202.998.845,00
	Prov. Kalimantan Tengah	319.473.998,00	1.212.573.457,00	1.532.047.455,00
	KALIMANTAN SELATAN	2.163.356.394,00	79.449.847.429,00	81.613.203.823,00
1	Kab. Banjar	58.962.525,00	13.773.625.426,00	13.832.587.951,00
2	Kab. Barito Kuala	-	2.648.328.247,00	2.648.328.247,00
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	2.690.339.066,00	2.690.339.066,00
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	2.648.328.247,00	2.648.328.247,00
5	Kab. Hulu Sungai Utara	-	2.648.328.247,00	2.648.328.247,00
6	Kab. Kota Baru	1.108.108.572,00	10.758.728.458,00	11.866.837.030,00
7	Kab. Tabalong	51.427.829,00	2.648.328.247,00	2.699.756.076,00
8	Kab. Tanah Laut	27.570.397,00	4.156.662.077,00	4.184.262.474,00
9	Kab. Tapin	3.397.862,00	5.702.913.775,00	5.706.311.637,00
10	Kota Banjar Baru	30.723.648,00	2.843.977.780,00	2.874.701.428,00
11	Kota Banjarmasin	-	2.648.328.247,00	2.648.328.247,00
12	Kab. Balangan	-	2.648.328.247,00	2.648.328.247,00
13	Kab. Tanah Bumbu	450.494.282,00	7.743.641.878,00	8.194.136.160,00
	Prov. Kalimantan Selatan	432.671.279,00	15.889.969.487,00	16.322.640.766,00
	KALIMANTAN TIMUR	2.863.832.470,00	110.116.296.375,00	112.980.130.845,00
1	Kab. Berau	703.424.280,00	3.670.543.279,00	4.373.967.559,00
2	Kab. Bulungan	121.732.659,00	5.265.411.903,00	5.387.144.562,00
3	Kab. Kutai Kartanegara	752.986.302,00	23.234.824.298,00	23.987.810.600,00
4	Kab. Kutai Barat	21.244.480,00	4.076.107.946,00	4.097.352.426,00
5	Kab. Kutai Timur	460.468.811,00	4.468.248.910,00	4.928.717.721,00
6	Kab. Malinau	-	3.670.543.279,00	3.670.543.279,00
7	Kab. Nunukan	960.000,00	3.670.543.279,00	3.671.503.279,00
8	Kab. Paser	110.345.450,00	16.878.421.801,00	16.988.767.251,00
9	Kota Balikpapan	-	3.670.543.279,00	3.670.543.279,00
10	Kota Bontang	-	3.670.543.279,00	3.670.543.279,00
11	Kota Samarinda	43.062.396,00	8.243.584.475,00	8.286.646.871,00
12	Kota Tarakan	-	3.670.543.279,00	3.670.543.279,00
13	Kab. Penajam Paser Utara	76.841.598,00	3.903.179.692,00	3.980.021.290,00
	Prov. Kalimantan Timur	572.766.494,00	22.023.259.876,00	22.596.026.370,00
	SULAWESI UTARA	-	1.125.822.489,00	1.125.822.489,00
1	Kab. Bolaang Mongondow	-	450.328.998,00	450.328.998,00
2	Kab. Minahasa	-	56.291.124,00	56.291.124,00
3	Kab. Sangihe	-	56.291.124,00	56.291.124,00
4	Kota Bitung	-	56.291.124,00	56.291.124,00
5	Kota Manado	-	56.291.124,00	56.291.124,00
6	Kab. Kepulauan Talaud	-	56.291.124,00	56.291.124,00
7	Kab. Minahasa Selatan	-	56.291.124,00	56.291.124,00
8	Kota Tomohon	-	56.291.124,00	56.291.124,00
9	Kab. Minahasa Utara	-	56.291.124,00	56.291.124,00
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)	-	-	-
11	Kota Kotamobago	-	-	-
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	-	-
13	Kab. Minahasa Tenggara (Mitro)	-	-	-
	Prov. Sulawesi Utara	-	225.164.499,00	225.164.499,00
	GORONTALO	18.452.800,00	-	18.452.800,00
1	Kab. Bolemo	-	-	-
2	Kab. Gorontalo	14.762.240,00	-	14.762.240,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(dalam rupiah)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Iuran Tetap	Royalty	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
3	Kota Gorontalo	-	-	-
4	Kab. Pohuwato	-	-	-
5	Kab. Bone Bolango	-	-	-
6	Kab. Gorontalo Utara	-	-	-
	Prov. Gorontalo	3.690.560,00	-	3.690.560,00
	SULAWESI TENGAH	309.220.808,00	177.204.204,00	486.425.012,00
1	Kab. Banggai	129.979.200,00	70.881.684,00	200.860.884,00
2	Kab. Banggai Kepulauan	-	7.875.742,00	7.875.742,00
3	Kab. Buol	-	7.875.742,00	7.875.742,00
4	Kab. Toli-Toli	-	7.875.742,00	7.875.742,00
5	Kab. Donggala	-	7.875.742,00	7.875.742,00
6	Kab. Morowali	110.497.667,00	7.875.742,00	118.373.429,00
7	Kab. Poso	6.899.760,00	7.875.742,00	14.775.502,00
8	Kota Paku	-	7.875.742,00	7.875.742,00
9	Kab. Parigi Moutong	-	7.875.742,00	7.875.742,00
10	Kab. Tojo Una-Una	-	7.875.742,00	7.875.742,00
	Prov. Sulawesi Tengah	61.844.181,00	35.440.842,00	97.285.023,00
	SULAWESI SELATAN	241.072.182,00	8.060.027.656,00	8.301.099.838,00
1	Kab. Bantaeng	-	146.545.957,00	146.545.957,00
2	Kab. Barru	-	146.545.957,00	146.545.957,00
3	Kab. Bone	-	146.545.957,00	146.545.957,00
4	Kab. Bukukumba	-	146.545.957,00	146.545.957,00
5	Kab. Enrekang	-	146.545.957,00	146.545.957,00
6	Kab. Gowa	-	146.545.957,00	146.545.957,00
7	Kab. Jeneponto	-	146.545.957,00	146.545.957,00
8	Kab. Luwu	-	146.545.957,00	146.545.957,00
9	Kab. Luwu Utara	-	146.545.957,00	146.545.957,00
10	Kab. Maros	6.144.000,00	146.545.957,00	152.689.957,00
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	-	146.545.957,00	146.545.957,00
12	Kab. Pinrang	-	146.545.957,00	146.545.957,00
13	Kab. Selayar	-	146.545.957,00	146.545.957,00
14	Kab. Sidenreng Rappang	-	146.545.957,00	146.545.957,00
15	Kab. Sinjai	-	146.545.957,00	146.545.957,00
16	Kab. Soppeng	-	146.545.957,00	146.545.957,00
17	Kab. Takalar	3.619.840,00	146.545.957,00	150.165.797,00
18	Kab. Tana Toraja	-	146.545.957,00	146.545.957,00
19	Kab. Wajo	-	146.545.957,00	146.545.957,00
20	Kota Pare-pare	-	146.545.957,00	146.545.957,00
21	Kota Makassar	-	146.545.957,00	146.545.957,00
22	Kota Palopo	-	146.545.957,00	146.545.957,00
23	Kab. Luwu Timur	183.093.906,00	3.224.011.068,00	3.407.104.974,00
	Prov. Sulawesi Selatan	48.214.436,00	1.612.005.534,00	1.660.219.970,00
	SULAWESI BARAT	-	-	-
1	Kab. Majene	-	-	-
2	Kab. Mamuju	-	-	-
3	Kab. Polewali Mandar	-	-	-
4	Kab. Mamasa	-	-	-
5	Kab. Mamuju Utara	-	-	-
	Prov. Sulawesi Barat	-	-	-
	SULAWESI TENGGARA	310.539.443,00	7.280.822.657,00	7.571.162.100,00
1	Kab. Buton	14.272.000,00	353.203.407,00	367.475.407,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(dalam rupiah)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Iuran Tetap	Royalti	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
2	Kab. Konawe	89.815.708,00	322.894.340,00	412.510.048,00
3	Kab. Kolaka	48.149.880,00	2.873.739.908,00	2.921.889.788,00
4	Kab. Muna	14.140.160,00	322.894.340,00	336.634.500,00
5	Kota Kendari	-	322.894.340,00	322.894.340,00
6	Kota Bau-bau	-	322.894.340,00	322.894.340,00
7	Kab. Konawe Selatan	20.597.183,00	322.894.340,00	343.291.523,00
8	Kab. Bombana	22.668.568,00	322.894.340,00	345.362.908,00
9	Kab. Wakatobi	-	322.894.340,00	322.894.340,00
10	Kab. Koleka Utara	38.788.055,00	322.894.340,00	381.482.395,00
11	Kab. Konawe Utara	-	-	-
12	Kab. Buton Utara	-	-	-
	Prov. Sulawesi Tenggara	62.107.889,00	1.452.124.532,00	1.514.232.421,00
	BALI	-	-	-
1	Kab. Badung	-	-	-
2	Kab. Bangli	-	-	-
3	Kab. Buleleng	-	-	-
4	Kab. Gianyar	-	-	-
5	Kab. Jembrana	-	-	-
6	Kab. Karangasem	-	-	-
7	Kab. Klungkung	-	-	-
8	Kab. Tabanan	-	-	-
9	Kota Denpasar	-	-	-
	Prov. Bali	-	-	-
	NUSA TENGGARA BARAT	2.061.427,00	30.347.314.600,00	30.349.366.027,00
1	Kab. Bima	1.577.280,00	1.517.365.730,00	1.518.943.010,00
2	Kab. Dompu	-	1.517.365.730,00	1.517.365.730,00
3	Kab. Lombok Barat	-	1.517.365.730,00	1.517.365.730,00
4	Kab. Lombok Tengah	-	1.517.365.730,00	1.517.365.730,00
5	Kab. Lombok Timur	-	1.517.365.730,00	1.517.365.730,00
6	Kab. Sumbawa	26.360,00	1.517.365.730,00	1.517.392.090,00
7	Kota Mataram	-	1.517.365.730,00	1.517.365.730,00
8	Kota Bima	-	1.517.365.730,00	1.517.365.730,00
9	Kab. Sumbawa Barat	37.512,00	12.138.925.640,00	12.138.963.352,00
	Prov. Nusa Tenggara Barat	410.285,00	6.069.482.920,00	6.069.873.205,00
	NUSA TENGGARA TIMUR	8.031.200,00	85.742.682,00	103.773.882,00
1	Kab. Alor	-	2.553.138,00	2.553.138,00
2	Kab. Belu	1.681.600,00	2.553.138,00	4.234.738,00
3	Kab. Ende	-	2.553.138,00	2.553.138,00
4	Kab. Flores Timur	-	2.553.138,00	2.553.138,00
5	Kab. Kupang	-	2.553.138,00	2.553.138,00
6	Kab. Lembata	-	2.553.138,00	2.553.138,00
7	Kab. Manggarai	4.743.390,00	38.297.075,00	43.040.435,00
8	Kab. Ngada	-	2.553.138,00	2.553.138,00
9	Kab. Sikka	-	2.553.138,00	2.553.138,00
10	Kab. Sumba Barat	-	2.553.138,00	2.553.138,00
11	Kab. Sumba Timur	-	2.553.138,00	2.553.138,00
12	Kab. Timor Tengah Selatan	-	2.553.138,00	2.553.138,00
13	Kab. Timor Tengah Utara	-	2.553.138,00	2.553.138,00
14	Kota Kupang	-	2.553.138,00	2.553.138,00
15	Kab. Rota Ndao	-	2.553.138,00	2.553.138,00
16	Kab. Manggarai Barat	-	2.553.138,00	2.553.138,00
17	Kab. Nagekeo	-	-	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(dalam rupiah)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Iuran Tetap	Royalty	Jumlah OBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
18	Kab. Sumba Barat Daya	-	-	-
19	Kab. Sumba Tengah	-	-	-
	Prov. Nusa Tenggara Timur	1.608.240,00	19.148.537,00	20.754.777,00
	MALUKU	-	-	-
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	-	-	-
2	Kab. Maluku Tengah	-	-	-
3	Kab. Maluku Tenggara	-	-	-
4	Kab. Pulau Buru	-	-	-
5	Kota Ambon	-	-	-
6	Kab. Seram Bagian Barat	-	-	-
7	Kab. Seram Bagian Timur	-	-	-
8	Kab. Kepulauan Aru	-	-	-
	Prov. Maluku	-	-	-
	MALUKU UTARA	51.229.416,00	14.481.160.830,00	14.562.380.246,00
1	Kab. Halmahera Tengah	3.639.776,00	827.494.333,00	831.134.109,00
2	Kab. Halmahera Barat	-	827.494.333,00	827.494.333,00
3	Kota Ternate	-	827.494.333,00	827.494.333,00
4	Kab. Halmahera Timur	31.574.528,00	4.208.146.103,00	4.239.722.631,00
5	Kota Tidore Kepulauan	-	827.494.333,00	827.494.333,00
6	Kab. Kepulauan Sula	-	827.494.333,00	827.494.333,00
7	Kab. Halmahera Selatan	29.768.228,00	827.494.333,00	857.263.561,00
8	Kab. Halmahera Utara	-	2.411.806.563,00	2.411.806.563,00
	Prov. Maluku Utara	18.245.883,00	2.896.230.166,00	2.912.476.049,00
	PAPUA	-	209.869.919.947,00	209.869.919.947,00
1	Kab. Biak Numfor	-	4.418.314.104,00	4.418.314.104,00
2	Kab. Jayapura	-	4.418.314.104,00	4.418.314.104,00
3	Kab. Jayawijaya	-	4.418.314.104,00	4.418.314.104,00
4	Kab. Merauke	-	4.418.314.104,00	4.418.314.104,00
5	Kab. Mimika	-	83.947.967.981,00	83.947.967.981,00
6	Kab. Nabire	-	4.418.314.104,00	4.418.314.104,00
7	Kab. Paniai	-	4.418.314.104,00	4.418.314.104,00
8	Kab. Puncak Jaya	-	4.418.314.104,00	4.418.314.104,00
9	Kab. Yapan Waropen	-	4.418.314.104,00	4.418.314.104,00
10	Kota Jayapura	-	4.418.314.104,00	4.418.314.104,00
11	Kab. Sarmi	-	4.418.314.104,00	4.418.314.104,00
12	Kab. Keerom	-	4.418.314.104,00	4.418.314.104,00
13	Kab. Yahukimo	-	4.418.314.104,00	4.418.314.104,00
14	Kab. Pegunungan Bintang	-	4.418.314.104,00	4.418.314.104,00
15	Kab. Tolikara	-	4.418.314.104,00	4.418.314.104,00
16	Kab. Boyen Digoel	-	4.418.314.104,00	4.418.314.104,00
17	Kab. Meppel	-	4.418.314.104,00	4.418.314.104,00
18	Kab. Asmat	-	4.418.314.104,00	4.418.314.104,00
19	Kab. Waropen	-	4.418.314.104,00	4.418.314.104,00
20	Kab. Supiori	-	4.418.314.104,00	4.418.314.104,00
21	Kab. Mamberamo Raya	-	-	-
	Prov. Papua	-	41.973.983.990,00	41.973.983.990,00
	PAPUA BARAT	1.840.000,00	-	1.840.000,00
1	Kab. Sorong	1.472.000,00	-	1.472.000,00
2	Kab. Manokwari	-	-	-
3	Kab. Fak Fak	-	-	-
4	Kota Sorong	-	-	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(dalam rupiah)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Iuran Tetap	Royalti	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
5	Kab. Sorong Selatan	-	-	-
6	Kab. Raja Ampat	-	-	-
7	Kab. Teluk Bintuni	-	-	-
8	Kab. Teluk Wondama	-	-	-
9	Kab. Kaimana	-	-	-
	Prov. Papua Barat	368.000,00	-	368.000,00
TOTAL NASIONAL		21.671.240.638,00	676.764.104.350,00	697.435.344.988,00

MENTERI KEUANGAN

itd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIK 060041107

